

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kota Makassar**

**Author**

Zulkipli<sup>1</sup>, Nasir Hamzah<sup>2</sup>, Junaidin Zakaria<sup>3\*</sup>

**Email**

[zulkipli.atk@gmail.com](mailto:zulkipli.atk@gmail.com)  
[nasir.hamzah@umi.ac.id](mailto:nasir.hamzah@umi.ac.id),  
[junaid.din.zakaria@umi.ac.id](mailto:junaid.din.zakaria@umi.ac.id)

**Afiliasi**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia  
<sup>2,3\*</sup>Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar. Hipotesis penelitian menggunakan basis teori/konsep, didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan variabel. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis data yang digunakan adalah data Sekunder. Data yang dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 20 tahun. Menggunakan teknik statistik deskriptif dan regresi linear berganda berbantuan SPSS 25 untuk analisis data. Hasil penelitian menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar, Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah

**Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 yang sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan dengan perubahan terakhir ialah UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas Otonomi.

Pemerintah Pusat menyerahkan hak kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengelola daerahnya sendiri. Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pelayanan umum di daerahnya masing-masing dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Perda). APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah secara umum merupakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Selisih antara pendapatan dan belanja daerah disebut Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Jika pendapatan lebih besar dari belanja maka disebut SiLPA dan jika pendapatan lebih kecil dari belanja maka disebut SiKPA.

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif. Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD.

Berlakunya Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintahan pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Tujuan dari transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan (PP No.58 Tahun 2005). Selama ini alokasi belanja daerah dipenuhi melalui penerimaan dalam APBD. Dalam Pasal 155 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa “penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di danai dari dan atas beban APBD.” Pengalokasian belanja daerah sangat bergantung pada pendapatan yang diterima oleh masing-masing pemerintah daerah baik itu dari sumber pendapatan daerah yaitu PAD maupun bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil, dengan begitu pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakatnya.

Belanja daerah dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban daerah. Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja Daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dapat diartikan sebagai seluruh pengeluaran bendahara umum/daerah yang akan mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan pengeluaran ini tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah (Nordian, 2017:19). Belanja daerah adalah pengeluaran daerah yang dijadikan kewajiban untuk mendanai semua pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Setiap Daerah diharapkan untuk dapat menggunakan anggaran Belanja Daerah ini secara optimal sesuai dengan kebutuhan akan daerahnya masing-masing.

Perkembangan dan alokasi belanja daerah ditentukan oleh penerimaan daerah yang bersangkutan. Pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan Pendapatan lain-lain yang sah, merupakan sumber pendapatan dan penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Salah satu sumber dana yang penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Adanya transfer dana (DAU) bagi Pemerintah Daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri (PAD). Tetapi, pada

kenyataan yang terjadi pada saat ini dana perimbangan dari pemerintah pusat seringkali dijadikan sumber dana utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah (Hadi, 2011:42) . Padahal tujuan utama dari adanya dana perimbangan tersebut untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah. Dana Alokasi Umum seharusnya sebagai insentif untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) .Tetapi yang terjadi saat ini Dana Alokasi Umum menjadi sumber penerimaan daerah yang lebih besar jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Penyusunan anggaran Belanja Daerah dapat menunjukkan apakah suatu daerah peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, mendukung pertumbuhan dan mendukung terhadap terciptanya kesempatan kerja. Pada komponen Belanja Daerah juga terlihat seberapa besar porsi belanja langsung yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Dengan semakin besarnya pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja daerah akan lebih besar untuk meningkatkan berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik.

Berikut data Realisasi Belanja Daerah, DAU dan PAD Kota Makassar tahun 2010 sampai dengan 2019:

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, DAU dan Belanja Daerah Tahun 2010 – 2019 dalam Juta Rupiah**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah)	DAU (Juta Rupiah)	Belanja Daerah (Juta Rupiah)
2010	210.068,21	644.266,43	1.378.034,45
2011	349.388,86	718.481,32	1.711.878,13
2012	487.390,34	911.122,80	1.966.706,01
2013	619.593,14	1.033.583,90	2.335.016,79
2014	730.988,64	1.114.853,21	2.870.063,43
2015	828.871,89	1.198.886,38	3.061.176,65
2016	971.859,75	1.324.023,14	3.277.243,22
2017	1.337.231,09	1.300.764,31	3.312.532,29
2018	1.185.453,01	1.300.764,31	3.522.986,46
2019	1.303.316,34	1.379.148,20	3.548.006,64

Sumber: BPS Kota Makassar , 2020

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa belanja daerah Kota Makassar setiap tahun mengalami peningkatan akan tetapi kontribusi PAD terhadap belanja daerah dikota Makassar masih di bawah Dana Alokasi Umum hal ini menandakan ketergantungan belanja daerah kota Makassar tergolong tinggi terhadap dana bantuan dari pusat. Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia termasuk Kota Makasaar di bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan/kotribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. “PAD sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan” (Saragih, 2003:57). Semakin besar jumlah uang

yang tersedia, semakin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan.

Penerimaan daerah dari unsur PAD saja belum mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan daerah” (Saragih, 2003:57), sehingga daerah masih tetap membutuhkan bantuan atau dana perimbangan yang berasal dari pusat. Salah satu dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum. “Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah” (UU No. 33/2004). DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan luar daerah atau dana hibah murni, dimana kewenangan penggunaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat.

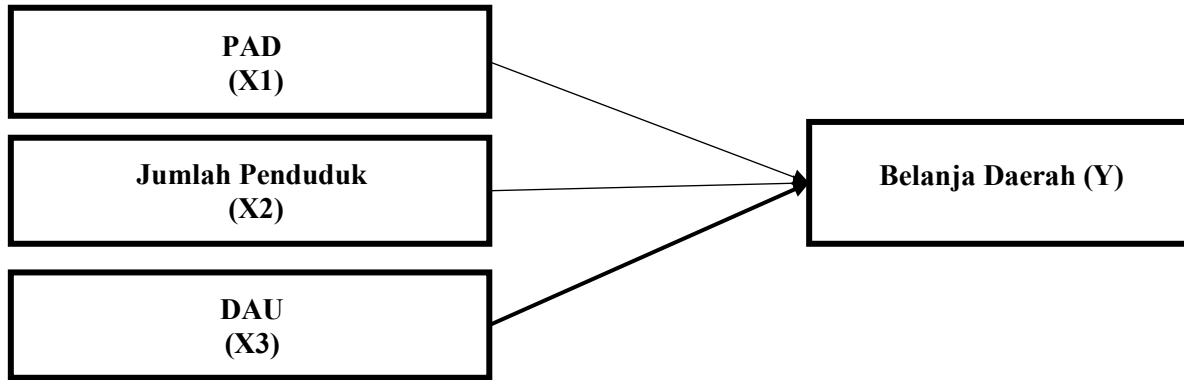
Selanjutnya jumlah penduduk juga mempengaruhi belanja daerah. Bagi pemerintah daerah jumlah penduduk yang banyak merupakan aset penting untuk pembangunan sepanjang penduduk daerah tersebut dapat meningkatkan kualitas maupun keterampilannya dan berkontribusi pada peningkatan produksi nasional. Pada sisi lain jumlah penduduk yang banyak dapat juga menjadi beban pembangunan apabila kualitas sumber daya manusia rendah dengan tingkat produktivitas yang rendah, yang pada gilirannya akan mempengaruhi struktur belanja daerah. Dalam kondisi seperti ini pemerintah daerah dituntut untuk lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk membiayai urusan pelayanan sosial dan tidak berorientasi pada modal dan belanja pembangunan.

**Tabel 2. Penduduk Kota Makassar Tahun 2010 – 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (Jiawa)</b>
2010	1.148.312
2011	1.339.374
2012	1.369.606
2013	1.408.072
2014	1.429.242
2015	1.449.401
2016	1.469.601
2017	1.489.011
2018	1.508.154
2019	1.526.677

*Sumber: BPS Kota Makassar , 2020*

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat perkembangan jumlah penduduk dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, Karena meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Menurut (Hadi, 2011:50) pengeluaran belanja daerah juga dilihat dari perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah, apabila perkembangan jumlah penduduk semakin besar maka akan memerlukan anggaran yang semakin besar. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar untuk peningkatan sarana dan prasarana agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Sehingga, penduduk selain menjadi beban bagi belanja daerah, penduduk juga turut berperan penting dalam peningkatan belanja daerah.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Makassar. 2) Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Makassar. 3) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Makassar.

### Metode Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendapat gambaran tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum yang terkait terhadap Belanja Daerah Kota Makassar. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan diolah dengan metode Ordinary Least Square (OLS) sebagai metode utama penelitian. Data penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan dari dokumen pemerintah daerah di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar berupa data kuantitatif. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar seperti Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah Kota Makassar. Data yang digunakan berupa data time series dari Kota Makassar Tahun 2001-2019 dan yang bersifat eksternal didapat melalui sumber-sumber instansi luar yang dipublikasikan seperti jurnal, artikel, perpustakaan. Data penelitian ini diperoleh dalam bentuk data yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Makassar untuk mendukung dan memperkuat penelitian, metode dokumentasi didukung oleh sumber informasi melalui penelaahan studi pustaka, dan berbagai sumber, seperti buku yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan, majalah, naskah, kisah sejarah, dan dokumen. Metode analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS version 25. Data yang digunakan dalam analisis ini berupa data time-series. model persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$$

### Hasil dan Pembahasan

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Uji normalitas dengan bantuan SPSS dengan menggunakan uji kolmogorof-smirnov adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Kolmogorov-Smirnov

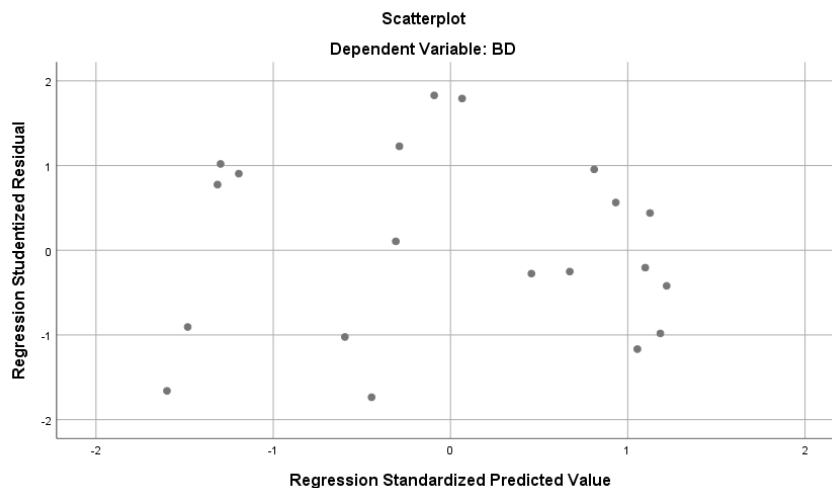
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	,0000000	,0000000
	,07739024	,01932889
Most Extreme Differences	,121	,249
	,110	,152
	-,121	-,249
Test Statistic		,121
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: output SPSS (2021)

Pada Tabel 2 uji normalitas memiliki nilai signifikansi 0,200 yaitu Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Data dalam penelitian ini memiliki variasi yang sama, maka data layak digunakan.

Selanjutnya Uji Heterokedestisitas, untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas, metode yang digunakan adalah metode chart (diagram Scatterplot). Jika: 1. Jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik, yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi Heteroskedastisitas. 2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.



Gambar 2. Diagram Scatterplot

Sumber: output SPSS (2021)

Berdasarkan Gambar 4, maka dapat dilihat bahwa data tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Selanjutnya dilakukan Uji Multikolinieritas, uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yakni dengan melihat Variance Inflation Factor (VIF). VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi tersebut.

Selanjutnya Berdasarkan pengolahan data analisa regresi linear Berganda dengan bantuan program SPSS 25, diperoleh hasil seperti dimuat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. Model regresi data panel *fixed effect Model (FEM) LSDV***

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11,951	5,053		2,365	,056
1 PAD	-,339	,098	-1,074	-3,465	,013
Penduduk	,879	,580	,479	1,515	,180
DAU	-,482	,406	-,353	-1,188	,280

Sumber: output SPSS (2021)

Berdasarkan Tabel 4 maka diperoleh persamaan model regresi antara variabel independen PDRB, Lama Sekolah, Tenaga Kerja terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan (Y) sebagai berikut:

$$Y = 9,194 + 0,298X1 - 0,829X2 + 0,956X3$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa a. Konstanta sebesar 9,194 mengindikasikan bahwa secara umum apabila Variabel dependen PAD, Jumlah Penduduk, dan DAU terhadap variabel dependen yaitu bernilai konstan (tidak berubah) maka Belanja Daerah (Y) sebesar 9,194 persen, Koefisien PAD (X1) sebesar 0,298 mengindikasikan bahwa PAD (X1) berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Hal ini berarti terjadinya peningkatan PAD (X1) sebesar 1 persen maka akan meningkatkan Belanja Daerah (Y) sebesar 0,298 persen. Koefisien Penduduk (X2) sebesar -0,829 mengindikasikan bahwa Penduduk (X2) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Belanja Daerah (Y). Hal ini berarti terjadinya peningkatan Penduduk (X2), sebesar 1 persen maka akan menurunkan Belanja Daerah (Y) sebesar -0,829 persen, Koefisien DAU (X3) sebesar 0,956 mengindikasikan bahwa DAU (X3) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (Y). Hal ini berarti terjadinya peningkatan DAU (X3) sebesar 1 persen maka akan meningkatkan Belanja Daerah (Y) sebesar 0,956 persen

Selanjutnya Uji statistik t dalam penelitian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas t-statistic. Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh dependen PDRB (X1), Lama Sekolah (X2), dan Tenaga Kerja (X3) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Jika nilai probabilitas t-statistic lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$  atau 5% maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

**Tabel 5. Uji Parsial**

Model	t	Sig.
(Constant)	,935	,364
PAD	3,152	,006
Penduduk	-1,065	,303
DAU	7,872	,000

Sumber: output SPSS (2021)

Berdasarkan Tabel 5, diketahui tingkat signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat. 1) Hasil pengujian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan nilai coefficient PAD (X1) sebesar 0,298 sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 menyebabkan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y), 2) Hasil pengujian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan nilai coefficient Pendidikan (X2) sebesar -0,829



sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,303 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 menyebabkan H2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendidikan (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y), dan 3) Hasil pengujian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan nilai coefficient DAU (X3) sebesar 0,956 sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 menyebabkan H3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

Selanjutnya Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam penelitian menerangkan variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	,968 <sup>a</sup>	,936	,904	,02367	

a. Predictors: (Constant), DAU, Penduduk, PAD

b. Dependent Variable: BD

Sumber: output SPSS (2021)

Berdasarkan Tabel 9 di atas besarnya nilai Adjusted R Square adalah 0,989. Hal ini menunjukkan Belanja Daerah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel PAD (X1), Penduduk (X2), dan DAU (X3) sebesar 98,9%. Sedangkan sisanya 1,1% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel penelitian seperti Investasi dan Sumber Daya Alam

Selanjutnya Uji Simultan, Uji Simultan pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Uji F mengukur kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

**Tabel 7. Hasil Uji Simultan**

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	42,156	5	8,431	598,649	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1,296	92	,014		
	Total	43,452	97			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), DAU, Penduduk, PAD

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa dari uji F test nilai F hitung sebesar 551,057 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas (p-value) 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh PAD (X1), Penduduk (X2), dan DAU (X3) secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (Y).

## ***Pembahasan***

### ***Pendapaan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Makassar***

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan hasil variabel Pendapaan Asli Daerah berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kemiskinan. Dengan demikian dapat dikatakan Pendapaan Asli Daerah merupakan faktor penentu meningkat dan turunnya Belanja Daerah Kota Makassar tahun 2001 sampai dengan 2019.



Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendaptan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri daribelanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan programdan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Tujuan utama desentralisasi fiskal melalui pendapatan asli daerah adalah terciptanya kemandirian pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal (Halim, 2008). Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika pendapatan asli daerah suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran daerah juga akan mengalami suatu peningkatan. Semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar juga belanja daerah (Halim, 2008).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Fajar (2017), hasil Penelitian menemukan secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

### ***Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kota Makassar***

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan hasil variabel Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian dapat dikatakan Jumlah Penduduk bukan merupakan faktor penentu meningkat dan turunnya Belanja Daerah Kota Makassar tahun 2001 sampai dengan 2019.

Jika jumlah penduduk sebagai salah satu komponen kebutuhan daerah mengalami peningkatan maka belanja daerah yang dikeluarkan harus lebih banyak. Bagi pemerintah daerah jumlah penduduk yang banyak merupakan aset penting untuk pembangunan sepanjang penduduk daerah tersebut dapat meningkatkan kualitas maupun keterampilannya dan berkontribusi pada peningkatan produksi nasional. Pada sisi lain jumlah penduduk yang banyak dapat juga menjadi beban pembangunan apabila kualitas sumber daya manusia rendah dengan tingkat produktivitas yang rendah, yang pada gilirannya akan mempengaruhi struktur belanja daerah. Dalam kondisi seperti ini pemerintah daerah dituntut untuk lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk membiayai urusan pelayanan sosial dan tidak berorientasi pada modal dan belanja pembangunan. Karena tingginya pertumbuhan penduduk di negara sedang berkembang mengakibatkan kesejahteraan penduduk menjadi terganggu.

Peranan penduduk dalam pembangunan sangat penting, sesuai dengan asumsi klasik bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar merupakan gambaran tersedianya pasar yang luas dan jaminan tersedianya input faktor produksi. Pertambahan jumlah penduduk yang besar mempunyai implikasi yang luas terhadap program pembangunan, karena pertambahan penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah akan menjadi beban pembangunan (Arjoso, 2006). Penduduk dapat merupakan faktor pendukung dan juga sebagai faktor penghambat dalam pembangunan. Penduduk sebagai pendukung atau modal pembangunan karena dengan jumlah penduduk besar dapat menyediakan tenaga kerja yang besar yang dapat bertindak sebagai produsen dan juga sebagai konsumen utama terhadap hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan akan berkontribusi tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penduduk dikatakan sebagai

faktor penghambat apabila jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah akan menjadi beban pemerintah dalam pembangunan (Suparmoko, 2000). Disisi lain penduduk selaku obyek dan sasaran dalam pembangunan memiliki peranan penting bagi pemerintah daerah sebagai dasar membuat perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan dan pengalokasian anggaran belanja khususnya melalui belanja langsung untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Teori Peacock & Wiseman (Mangkoesoebroto:1993). Teori mereka sering disebut sebagai The Displacement Effect, dimana teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap belanja daerah.

### ***Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kota Makassar***

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan hasil variabel DAU berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian dapat dikatakan Jumlah Penduduk bukan merupakan faktor penentu meningkat dan turunnya Belanja Daerah Kota Makassar tahun 2001 sampai dengan 2019.

Hal ini berarti dalam sisi kepercayaan, DAU menunjukkan bahwa pemerintah daerah memperoleh kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah pusat dalam hal penggunaan dana transfer yang diterima dari pusat. Kepercayaan besar yang diterima ini karena penggunaan DAU tidak diatur oleh pemerintah pusat, dan DAU menjadi sebuah dana yang kendali penggunaannya benar-benar berada di tangan pemerintah daerah, umunya penggunaan DAU oleh pemerintah daerah didasarkan atas prioritas dan kebutuhan daerah dengan maksud untuk melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan keuangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Prakosa, 2004). Terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang memang dibutuhkan. Semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah (Halim, 2008). Holtz-Eakin, Dkk (1985) dalam Prakosa (2004) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja Pemerintah Daerah. Berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek lebih ditentukan oleh transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Idealnya semua komponen penerimaan daerah mempunyai korelasi yang positif terhadap besarnya belanja daerah. Peningkatan belanja daerah diharapkan memprioritaskan aspek pelayanan publik, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan (peningkatan pertumbuhan ekonomi) dan pada gilirannya terjadi peningkatan kontribusi pajak maupun retribusi dari masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriliawati dan Handayani (2016) Hasil Penelitian menemukan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka simpulan dalam penelitian ini adalah 1) PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Makassar yang berarti terjadinya peningkatan atau penurunan PAD Kota

Makassar maupun mempengaruhi Belanja Daerah Kota Makassar, 2) Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Makassar yang berarti terjadinya peningkatan atau penurunan Jumlah Penduduk Kota Makassar tidak mempengaruhi Belanja Daerah Kota Makassar, dan 3) DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Makassar yang berarti terjadinya peningkatan atau penurunan DAU Kota Makassar maupun mempengaruhi Belanja Daerah Kota Makassar

## Referensi

- Apriliawati, K. N., & Handayani, N. (2016). Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(2).
- Arjoso. 2006. Rencana Strategis BKKBN. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKKBN
- Halim, Abdul. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Hadi, Nor. 2011. Corporate Social Responsibility. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Mangkoesobroto. 1993. Ekonomi Publik (Edisi 3). Yogyakarta : BPFE UGM
- Nordiawan, D. (2017). Anggaran Disuatu Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Putri, H. Y. (2015). Analisis Flypaper Effect, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2012-2013).
- Prakosa, K.B. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 8 (2),
- Rahmawati, M., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1).
- Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Suparmoko, 2000. Keuangan Negara: Teori dan Praktek. BPFE-Yogyakarta.